



LAPORAN KEUANGAN

TINGKAT UAKPA (Audited)

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Pekanbaru mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPKNL Pekanbaru. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pekanbaru, 04 Mei 2026
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Moh. Arif Rochman

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum.....	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	22
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	31
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	35
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	40
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	42
VI. Lampiran	

KPKNL PEKANBARU
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 24, SIMPANG TIGA, PEKANBARU
TELEPON (0761) 23845; FAKSIMILE (0761) 44593

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahunan KPKNL Pekanbaru Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2025 yang sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pekanbaru, 04 Mei 2026

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Moh. Arif Rochman

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan KPKNL Pekanbaru Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara Tahunan TA 2025 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp9.200.597.718 atau 51,31 persen di bawah estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp17.932.404.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp26.670.466.301 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp155.881.048, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0, Aset Tetap (neto) sebesar Rp26.513.972.753 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp612.500.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp104.033.201 dan Rp26.566.433.100.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.228.648.653 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp3.304.943.833 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp5.923.704.820, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar

Rp4.669.000 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp5.928.373.820.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp26.684.823.551, ditambah Surplus-LO sebesar Rp5.928.373.820 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar 10.905 dan Transaksi Antar Entitas sebesar -6.046.775.176 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp26.566.433.100.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan, serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	17.932.404.000	9.200.597.718	51,31	12.093.414.057
JUMLAH PENDAPATAN		17.932.404.000	9.200.597.718	51,31	12.093.414.057
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	-	-	-	-
Belanja Barang	B.2.2	3.057.353.000	2.606.680.278	85,26	2.675.692.543
Belanja Modal	B.2.3	617.024.000	136.306.200	22,09	1.771.644.997
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		3.674.377.000	2.742.986.478	74,65	4.447.337.540

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Pekanbaru, 04 Mei 2026
Kepala KPKNL Pekanbaru



Ditandatangani secara elektronik
Moh. Arif Rochman

II. NERACA

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKANBARU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1	104.033.201	345.117.641
Persediaan	C.2	4.474.987	20.521.952
Jumlah Aset Lancar		155.881.048	379.201.973
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.3	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.4	16.756.058.040	16.756.058.040
Peralatan dan Mesin	C.5	4.968.873.189	4.807.885.646
Gedung dan Bangunan	C.6	10.042.906.722	10.043.997.267
Aset Tetap Lainnya	C.7	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.8	(5.253.865.198)	(4.936.289.316)
Jumlah Aset Tetap		26.513.972.753	26.671.651.637
ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain	C.9	392.431.857	253.800.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.10	(391.819.357)	(253.800.000)
Jumlah Aset Lainnya		612.500	0
JUMLAH ASET		26.670.466.301	27.050.853.610
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	104.033.201	366.030.059
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		104.033.201	366.030.059
JUMLAH KEWAJIBAN		104.033.201	366.030.059
EKUITAS			
Ekuitas	C.12	26.566.433.100	26.684.823.551
JUMLAH EKUITAS		26.566.433.100	26.684.823.551
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		26.670.466.301	27.050.853.610

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Pekanbaru, 04 Mei 2026
Kepala KPKNL Pekanbaru



Ditandatangani secara elektronik
Moh. Arif Rochman

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKANBARU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	9.228.648.653	11.979.468.163
Jumlah Pendapatan		9.228.648.653	11.979.468.163
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Persediaan	D.3	38.510.965	68.673.539
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.565.104.684	1.516.815.058
Beban Pemeliharaan	D.5	685.920.763	790.318.645
Beban Perjalanan Dinas	D.6	330.168.241	300.724.547
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	685.239.180	627.118.635
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	-	-
Jumlah Beban		3.304.943.833	3.303.650.424
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		5.923.704.820	8.675.817.739
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.9	4.669.000	(36.101.900)
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.11	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		4.669.000	36.101.900
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		5.928.373.820	8.639.715.839
Pos Luar Biasa	D.10		
Pos Luar Biasa		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		5.928.373.820	8.639.715.839

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Pekanbaru, 04 Mei 2026
Kepala KPKNL Pekanbaru



Ditandatangani secara elektronik
Moh. Arif Rochman

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKANBARU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	26.684.823.551	24.015.645.061
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	5.928.373.820	8.639.715.839
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	10.905	64.282.168
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.4.3	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.4.4	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.5	10.905	64.290.188
Koreksi Lain-Lain	E.4.6	-	(8.020)
Jumlah		10.905	64.282.172
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	(6.046.775.176)	(6.034.819.517)
KENAIKAN /PENURUNAN EKUITAS		(118.390.451)	2.669.178.490
EKUITAS AKHIR	E.6	26.566.433.100	26.684.823.551

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Pekanbaru, 04 Mei 2026
 Kepala KPKNL Pekanbaru



Ditandatangani secara elektronik
 Moh. Arif Rochman

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Entitas berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 24, Simpang Tiga, Pekanbaru.

KPKNL Pekanbaru mempunyai tugas dan fungsi dalam pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Hal ini diwujudkan dengan visi KPKNL Pekanbaru yang menginduk pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), yaitu menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Adapun NKO KPKNL Pekanbaru sebesar 110,04.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sementara itu, SAKTI Modul Aset adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara, serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

KPKNL Pekanbaru menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sementara itu, basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPKNL Pekanbaru dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari KPKNL Pekanbaru. Di samping itu, dalam penyusunannya telah

diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Pekanbaru adalah sebagai berikut.

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LO disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja***(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban***(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan, sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan

hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 75 Tahun 2018 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai

Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa

memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya antara lain berupa aset tak berwujud, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas	20

Tanaman Semusim.	
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar

atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	17.932.404.000	-
Jumlah Pendapatan	17.932.404.000	-
Belanja		
Belanja Barang	3.057.353.000	-
Belanja Modal	617.024.000	-
Jumlah Belanja	3.674.377.000	-

Realisasi Pendapatan
Rp9.200.597.718

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.200.597.718 atau 51,31 persen di bawah estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp17.932.404.000. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp9.200.597.718. Pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 belum memenuhi target dan lebih rendah dibanding realisasi tahun 2024. Dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	17.932.404.000	9.200.597.718	51,31
Jumlah	17.932.404.000	9.200.597.718	(51,31)

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami penurunan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 23,92 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan
(Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	9.200.597.718	12.093.414.057	(23,92)
Jumlah	9.200.597.718	12.093.414.057	(23,92)

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) KPKNL Pekanbaru terdiri dari :

1. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan yang berasal dari sewa Rumah Dinas Golongan III yang pada tahun 2023 ditempati oleh kepala kantor dan kepala seksi;
2. Pendapatan Jasa Lainnya, seperti penyeteroran denda wanprestasi;
3. Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I;
4. Pendapatan Bea Lelang Pegadaian;

Realisasi
Penerimaan Pajak
Rp0

Realisasi
Penerimaan
Negara Bukan

Pajak
Rp9.200.597.718

5. Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.

B.1.1 Penerimaan Pajak

-

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.200.597.718 dan Rp12.093.414.057. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami penurunan sebesar 23,92 persen dari TA 2024. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	9.200.597.718	12.093.414.057	(23,92)
Jumlah	9.200.597.718	12.093.414.057	(23,92)

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	-	-	-
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.205.945.624	1.303.968.276	(7,52)
Pendapatan Bea Lelang Pejabat	-	-	-

Lelang Kelas II			
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	7.875.350.176	10.619.251.134	(25,84)
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	112.656.373	52.018.975	116,57
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	4.669.000	107.167.000	(95,64)
Pendapatan Jasa Lainnya	500.000	1.000.000	(50)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	8.910.000	-
Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	1.090.545	1.098.672	(0,73)
Jumlah	9.200.597.718	12.093.414.057	(23,92)

Realisasi Belanja Negara **B.2 Belanja**

Rp2.742.986.478

Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp2.742.986.478 atau 74,65% dari anggaran belanja sebesar Rp.3.674.377.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan TA 2025

U R A I A N	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	3.057.353.000	2.606.680.278	85,26
Belanja Modal	617.024.000	136.306.200	22,09
Jumlah	3.674.377.000	2.742.986.478	74,65

Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 38,32%. DIPA 2025 lebih rendah dibanding DIPA 2024, sehingga realisasi belanja 2025 juga lebih rendah dibanding realisasi belanja 2024. Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025
dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang	2.606.680.278	2.675.692.543	(2,58)
Belanja Modal	136.306.200	1.771.644.997	(92,31)
Jumlah	2.742.986.478	4.447.337.540	(38,32)

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja

Belanja Pegawai Pegawai TA 2025 sebesar 0,00 % dari TA 2024. Hal ini disebabkan Tidak ada belanja pegawai.

Rp0

*Realisasi Belanja
Barang
Rp3.057.353.000*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.606.680.278 dan Rp2.675.692.543. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 2,58% dari Realisasi TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Anggaran belanja tahun 2025 lebih sedikit dibanding dengan 2024, sehingga realisasi 2025 juga lebih rendah dibanding realisasi belanja 2024.

Realisasi Belanja
Modal
Rp136.306.200

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp136.306.200 dan Rp1.771.644.997. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 92,31% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh terdapat belanja modal gedung bangunan dan belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2024, sedangkan 2025 hanya ada belanja modal peralatan dan mesin.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember
2025 dan 2024*

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.306.200	598.015.878	77,21
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	1.173.629.119	-
Jumlah Belanja Kotor	136.306.200	1.771.644.997	(92,31)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	136.306.200	1.771.644.997	(92,31)

Realisasi Belanja
Modal Tanah Rp.0

B. 5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024.

Realisasi Belanja
Modal Peralatan

B. 5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

dan Mesin
Rp136.306.200

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp136.306.200 dan Rp598.015.878, mengalami penurunan sebesar 77,21% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Anggaran Belanja Modal 2025 lebih sedikit dibanding 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.306.200	598.015.878	(77,21)
Jumlah Belanja Kotor	136.306.200	598.015.878	(77,21)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	136.306.200	598.015.878	(77,21)

Realisasi Belanja
Modal Gedung dan
Bangunan Rp0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.173.629.119. Pada tahun 2025 tidak terdapat Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	1.173.629.119	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	1.173.629.119	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	1.173.629.119	-

Realisasi Belanja
Modal, Jalan,

B.5.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Irigasi dan Jaringan Rp0

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024.

Realisasi Belanja Modal Lainnya Rp0

B.5.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.5.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Belanja Bantuan Sosial .

B.6 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp104.033.201 dan Rp345.117.641, dilihat dari data yang disampaikan dapat diketahui adanya penurunan jumlah kas lainnya dan setara kas dari tahun 2024 ke 2025 sebesar Rp. (241.084.440) atau sebesar (69,86%).

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Unaudited) TA
2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	104.033.201	345.117.641
Jumlah	104.033.201	345.117.641

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp4.474.987 dan Rp20.521.952. Jumlah persediaan dari 2024 ke 2025 mengalami penurunan sebesar Rp16.046.965 atau sebesar 78,19%. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan
2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Barang Konsumsi	4.474.987	20.521.952
Jumlah	4.474.987	20.521.952

C.3 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

C.4 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp16.756.058.040 dan Rp16.756.058.040.

C.5 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp4.968.873.189 dan Rp4.807.885.646. Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar Rp.160.987.543 atau naik sebesar 3,35%.

C.6 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar

Rp10.042.906.722 dan Rp10.043.997.271. Adanya penurunan sebesar Rp.1.090.549 atau sebesar 0,01%.

C.7 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset tetap tersebut.

C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp5.253.865.198 dan Rp4.936.289.316. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

C.9 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp392.431.857 dan Rp253.800.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

C.10 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp391.819.357 dan Rp253.800.000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.11 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp104.033.201 dan Rp366.030.059. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

C.12 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp26.566.433.100 dan Rp26.684.823.551. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan
Perpajakan Rp 0*

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00.

*Pendapatan
Negara Bukan
Pajak
Rp9.228.648.653*

D.2 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp9.228.648.653 dan Rp11.979.468.163. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 22,96. Hal tersebut disebabkan oleh PNBP pada 2025 mengalami penurunan realisasi. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Bea Lelang diperoleh dari penyeteroran Bea Lelang Penjual dan Pembeli Lelang yang disetor melalui Bendahara Penerimaan KPKNL Pekanbaru;
2. Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara diperoleh dari debitur; dan
3. Pendapatan Bea Lelang Pegadaian.

*Beban Pegawai
Rp0*

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan

dengan pembentukan modal. Sejak dari pertengahan tahun 2020, belanja pegawai pada Direktorat jenderal Kekayaan Negara sudah melakukan sentralisasi belanja pegawai, sehingga akun belanja pegawai sudah tidak muncul pada Laporan operasional KPKNL Pekanbaru.

*Beban
Persediaan
Rp38.510.965*

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp38.510.965 dan Rp68.673.539.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 43,92 persen dibandingkan dengan Tahun 2024.

*Beban Barang
dan Jasa
Rp1.565.104.684*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.565.104.684 dan Rp1.516.815.058. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 3,18 persen dibandingkan dengan Tahun 2024.

*Beban
Pemeliharaan
Rp685.920.763*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp685.920.763 dan Rp790.318.645.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 13,21 persen dibandingkan dengan tahun 2024.

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp330.168.241*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp330.168.241 dan Rp300.724.547. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 9,79 persen dibandingkan dengan tahun 2024.

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp685.239.180*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp685.239.180 dan Rp627.118.635. Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

*Surplus (Defisit)
Penjualan Aset
Non Lancar Rp
4.669.000*

D.9 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Pos surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.669.000 dan Rp (36.101.900).

*Pos Luar Biasa
Rp0*

D.10 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp26.684.823.551

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.26.684.823.551 dan Rp.24.015.645.061.

Surplus LO
Rp.5.928.373.820

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.5.928.373.820 dan Rp.8.639.715.839. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Yang
Menambah/Me
ngurangi
Ekuitas
Rp.10.905

E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.10.905 dan Rp.64.282.168.

Transaksi Antar
Entitas
Rp(6.046.775.176)

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp (6.046.775.176) dan Rp (6.034.819.517). Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian / Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Ekuitas Akhir
Rp26.566.433.100

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.26.566.433.100 dan Rp.26.684.823.551.

E.6 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

-

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

-

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

-